

PEMBERITAAN MEDIA



LULUK'S UPDATE

**EDISI
12 – 18 Oktober 2020**

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**



Perpres Perdagangan Karbon

Perpres Perdagangan Karbon dan Tarif Energi Baru Terbarukan (EBT)

- Pemerintah tengah menyiapkan dua peraturan presiden (PP) mengenai perdagangan karbon dan tarif energi baru terbarukan (EBT) sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi berbasis lingkungan alias hijau supaya emisi karbon ke dunia bisa dikurangi.
- Kedua aturan ini diumumkan saat Menteri Keuangan Indonesia berbicara di Konferensi Iklim 2020 yang diadakan oleh Green Climate Fund (GCF) pada 14 Oktober 2020
- Ini merupakan komitmen Indonesia terhadap pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Indonesia juga terus berusaha mengembangkan potensi energi dari panas bumi.
- Indonesia juga telah menginisiasi berbagai instrumen pembiayaan ekonomi hijau untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. Namun, tak seluruhnya bisa didanai APBN. Sehingga pemerintah menginisiasi kerja sama pembiayaan ke ekonomi hijau berskema campuran yang berasal dari APBN, BUMN, organisasi internasional, dana filantropi serta keterlibatan dari swasta.

Konsep Ekonomi Hijau

- Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara terkait green recovery pada forum High Level Opening Dialogue of the Green Climate Fund Private Investment for Climate Conference. Menkeu juga menyampaikan komitmen Indonesia di bidang lingkungan hidup, yakni mengurangi emisi karbon.
- Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia sudah membuat suatu fondasi pada pelaksanaan ekonomi hijau. Program penanganan perubahan iklim telah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024, sehingga menjadi arus utama dalam strategi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) yang lebih luas.
- Dalam laporan update biennial kedua tahun 2018 menyebutkan Indonesia membutuhkan USD247,2 miliar (USD 19 miliar) per tahun untuk mencapai target NDC pada tahun 2030.

- Dari sisi pembiayaan, Indonesia menerbitkan Sovereign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018, dengan total yang berhasil dihimpun sebesar 2,75 miliar dolar AS. Dari pembiayaan ini dialokasikan untuk membiayai transportasi yang berkelanjutan seperti pembangunan jalur rel ganda dan pembangunan kapal yang hemat energi.
- Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dari dana tersebut untuk mitigasi banjir dan daerah rentan bencana serta akses terhadap sumber energi yang terbarukan serta menggunakan dana ini untuk proyek pengelolaan limbah dan efisiensi energi di seluruh negeri. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi sekitar 8,9 juta ekuivalen CO₂.
- Pemerintah juga telah menerbitkan green sukuk ritel pertama dunia pada tahun 2019 dengan total investasi sebesar 100 juta dolar AS.

- Pada saat menghadapi pandemi Covid-19 sekarang ini, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 47,9 miliar untuk stimulus fiskal khusus mengatasi pandemi serta program pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal ini sebesar 29% nya digunakan untuk skema perlindungan sosial, sedangkan 42% nya untuk insentif perpajakan, kredit dan stimulus untuk UMKM, BUMN serta korporasi. Stimulus ini juga termasuk pendanaan untuk proyek hijau padat karya seperti proyek respirasi mangrove yang mencakup 50 ribu hektar dan mempekerjakan 25 ribu.
- Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya implementasi green economy. Dalam 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020), Indonesia mampu mendanai 34% kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengisi celah pembiayaan 66% ini, sektor swasta didorong dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan untuk mendorong aksi iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek iklim karena memiliki keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi serta sumber pembiayaan.

- Tantangan bagi swasta adalah berbagai regulasi dan pasar keuangan yang belum berkembang serta jangka waktu yang sangat panjang atas sebuah risiko untuk sebuah proyek yang terkait dengan green program.
- Berbagai skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang inovatif sedang dikembangkan untuk lebih mendukung sektor swasta. Contohnya pemanfaatan blender finance dan melalui pembentukan instrumen **The SDG Indonesia One**. Yaitu platform blended finance yang akan mengumpulkan dan menggabungkan pembiayaan dari BUMN, swasta dan filantropis.
- Pemerintah juga mendirikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) yang bertugas mengelola dana lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mengelola dana REDD+ sebesar USD103,78 juta dari Green Climate Fund (GCF).
- Indonesia telah menetapkan peta jalan keuangan berkelanjutan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan portofolionya pada proyek hijau.
- Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF) yang akan menetapkan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target global Indonesia dalam pengurangan emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

- Selain dari pemerintah dan swasta, komunitas internasional juga memobilisasi pendanaan iklim. Untuk mendukung komitmen dan upaya negara berkembang, negara maju harus memperbarui dan memenuhi komitmen penyediaan USD100 miliar per tahun pada 2020 seperti yang dijanjikan pada COP ke-15 di 2009.
- Green Climate Fund (GCF) telah menunjukkan komitmennya untuk membantu negara berkembang dalam memobilisasi dana untuk proyek iklim. Pemerintah Indonesia mengapresiasi kontribusi GCF untuk Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD+ yang baru saja disetujui senilai USD103,78 juta.
- Dana RBP akan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan melalui dua kegiatan utama.
 - 1) penguatan kesatuan pengelolaan hutan pada restorasi hutan dan kegiatan bisnis yang akan mendorong investasi swasta dalam rantai nilai hasil hutan.
 - 2) meningkatkan program perhutanan sosial untuk menjamin mata pencaharian masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Sebagai catatan tambahan, pemerintah telah menjalankan skema perhutanan sosial sejak tahun 2015 seluas 12,7 juta ha

Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim

- WALHI melakukan analisis terkait Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim. Kesimpulannya adalah target penurunan emisi GRK Indonesia harus ditingkatkan untuk merefleksikan situasi sains terkini melihat adanya potensi Indonesia dapat menghabiskan sisa anggaran karbonnya.
- Skenario Proyeksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menengah dan tinggi yang dioutline oleh Bappenas akan menghabiskan 12 persen dan 14 persen masing-masing dari total anggaran karbon dunia pada 2045
- Ini berdasarkan estimasi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) PBB tentang anggaran karbon global yang tersisa dari awal 2018 untuk bisa menjaga pemanasan suhu bumi di bawah target 1,5 derajat Celcius.
- Estimasinya adalah 420 gigaton gabungan seluruh emisi GRK atau ekuivalen karbon dioksida (GtCO₂) untuk 66 persen peluang atau 580 GtCO₂ untuk 50 persen peluang.

- Dari kedua skenario PRK itu, diperkirakan Indonesia akan menghabiskan sisa anggaran karbonnya pada 2027. Hal itu berdasarkan estimasi bahwa Indonesia sampai dengan akhir abad ini memiliki anggaran karbon 14,8 GtCO₂ untuk 66 persen peluang atau 20,5 GtCO₂ untuk 50 persen peluang atau sekitar 3,5 persen dari sisa anggaran karbon dunia.
- Menurut laporan Bappenas "Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia" pada 2019, PRK menengah yaitu menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon 2020-2045 dan mencapai target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dari business as usual (BAU) pada 2030.
- Sedangkan target PRK tinggi adalah kebijakan lebih ambisius dari PRK menengah untuk 2020-2045 yang konsisten dengan upaya mencapai target kondisional NDC Indonesia yaitu 41 persen dengan bantuan internasional.
- WALHI mendorong agar Indonesia meningkatkan target NDC yang jauh lebih ambisius karena jika tidak menaikkannya pada 2030 maka akan menyulitkan penurunan emisi GRK ke depannya.

Ketahanan Iklim

10 Kota Percontohan Proyek Ketahanan Iklim

- 10 Kota terpilih sebagai percontohan Proyek CRIC (Climate Resilient and Inclusive Cities/Kota Berketahanan Iklim yang Inklusif) yang didanai oleh Uni Eropa.
- Proyek ini disiapkan dalam merumuskan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- Kota yang dipilih akan mendapat dukungan teknis dan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas berskala internasional.
- 10 kota percontohan adalah:
 1. Pangkal Pinang,
 2. Pekanbaru,
 3. Bandar Lampung,
 4. Cirebon,
 5. Banjarmasin,
 6. Samarinda,
 7. Mataram,
 8. Kupang,
 9. Ternate
 10. Gorontalo.
- Manfaat yang diperoleh:
 1. peningkatan kapasitas teknis bagi perangkat daerah.
 2. akses pendanaan untuk perubahan iklim.
 3. membangun akses jaringan internasional dengan menjalin kemitraan dengan kota lain di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa untuk mempromosikan praktik-praktik terkait tata kelola perubahan iklim

- Program CRIC adalah kolaborasi antara UCLG ASPAC, dengan lembaga-lembaga di Eropa (Pilot4Dev, ACR, Ecolise, Universitas Gustave Eiffel) dan India (AIILSG).
- Kegiatan ini akan berlangsung dari 2020 hingga 2024, dan menggandeng KLHK dan APEKSI.

- Ada 6 kriteria yang menentukan pemilihan kota percontohan CRIC:
 1. kota memiliki sumber daya untuk melaksanakan kegiatan,
 2. dukungan pemimpin daerah,
 3. kota yang mewakili zona iklim dan wilayah tertentu agar proyek dapat menerapkan pendekatan berbeda sesuai dengan karakteristik lokal,
 4. pelibatan Kelompok akademisi dan riset,
 5. tidak ada tumpang tindih dengan inisiatif/proyek lain
 6. peluang kemitraan dengan kota lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan

Sumber Berita

- <https://daerah.sindonews.com/read/195172/174/kota-gorontalo-menjadi-bagian-dari-proyek-ketahanan-iklim-1602591019>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4384103/pembangunan-rendah-karbon-jadi-prioritas-dalam-rpjmn-2020-2024>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4384648/sri-mulyani-tegaskan-komitmen-indonesia-atasi-perubahan-iklim-di-tengah-pandemi>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/RkjlVx6N-strategi-pemerintah-hadapi-perubahan-iklim-dan-pandemi-covid-19>
- <https://indopos.co.id/read/2020/10/17/258453/green-recovery-dorong-transformasi-ekonomi-berbasis-lingkungan-hidup/>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/akWLoW3K-menkeu-paparkan-jurus-pembangunan-hijau-di-indonesia>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1783309/laporan-walhi-ada-potensi-indonesia-habiskan-sisa-anggaran-karbon>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1788213/green-recovery-dorong-transformasi-ekonomi-berbasis-lingkungan-hidup>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201014212804-532-558524/pemerintah-siapkan-perpres-perdagangan-karbon-dan-tarif-ebt>
- <https://timlo.net/baca/115906/sri-mulyani-bicara-soal-konsep-ekonomi-hijau/>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1788157/sri-mulyani-tegaskan-indonesia-berkomitmen-atasi-perubahan-iklim>
- <https://akurat.co/ekonomi/id-1224554-read-menkeu-klaim-green-recovery-dorong-transformasi-ekonomi-global-berbasis-lingkungan-hidup>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/yNL4q31N-menkeu-dorong-transformasi-ekonomi-global-berbasis-pemulihan-hijau>

Madani

